BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 25 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16A Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 16A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pamekasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset, yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan.

BAB II
PENGALOKASIAN ADD
Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pamekasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB III
PEMBAGIAN ADD
Pasal 3

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan mempertimbangkan:

a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pasal 4

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut:

a. Kepala Desa, sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
b. Sekretaris Desa, sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa setiap bulan; dan
c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa, sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa setiap bulan.

BAB IV
BESARAN PENERIMAAN ADD

Pasal 5

Besaran penerimaan ADD berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. alokasi secara merata kepada seluruh desa sebesar 80% (delapan puluh per seratus), yang selanjutnya disebut Alokasi Merata (AM); dan
b. alokasi secara proporsional kepada setiap desa sebesar 20% (dua puluh per seratus), yang selanjutnya disebut Alokasi Adil (AA).

Pasal 6

Ketentuan pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menggunakan rumus sebagai berikut:

a. menentukan indikator dan bobot indikator:

Indikator	Bobot
1. jumlah penduduk desa	30%
2. angka kemiskinan desa	40%
3. luas wilayah desa	20%
4. indeks kesulitan geografis desa	10%

b. penghitungan Alokasi Adil (AA) desa x:
   1. koefisien indikator jumlah penduduk:
      $$\frac{\text{jumlah penduduk di desa}}{\text{jumlah penduduk se Kabupaten Pamekasan}} \times 30\% \text{ dari AA}$$
   2. koefisien indikator angka kemiskinan desa:
      $$\frac{\text{jumlah rumah tangga miskin di desa}}{\text{jumlah penduduk se Kabupaten Pamekasan}} \times 40\% \text{ dari AA}$$
   3. koefisien indikator luas wilayah desa:
      $$\frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{jumlah luas wilayah Kabupaten Pamekasan}} \times 20\% \text{ dari AA}$$
   4. koefisien indikator tingkat kesulitan geografis desa:
      $$\frac{\text{Indeks kesulitan geografis desa}}{\text{jumlah indeks kesulitan geografis seluruh}} \times 10\% \text{ dari AA}$$

c. penerimaan desa:

$$\mathbf{ADDx = AMx + \sum AAx}$$

ADD = Alokasi Dana Desa x
AM = Alokasi Merata yang diterima desa x
$\sum$AP = Jumlah Alokasi Adil yang diterima desa x

Pasal 7

Rincian besaran penerimaan ADD untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYALURAN ADD

Pasal 8

(1) ADD dikelola dalam APBDes.
(2) ADD disalurkan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut:
   a. triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
   b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
   c. triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); dan
   d. triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).
(3) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen persyaratan sebagai berikut:
   a. surat permintaan pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Desa dengan diketahui Camat;
   b. surat pernyataan tanggung jawab;
   c. kuitansi tanda terima bermeterai cukup;
   d. fotocopy rekening Kas Desa;
   e. peraturan desa tentang APBDes; dan
   f. laporan realisasi penggunaan dana triwulan sebelumnya.
(4) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum.
(5) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPKA untuk diterbitkan SP2D.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 31 Desember 2015
BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

A L W I

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

RINCIAN BESARAN PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA

SETIAP DESA TAHUN 2016

NO	KECAMATAN / DESA	BESARAN (Rp)
1	*2*	*3*
1	**KECAMATAN TLANAKAN**	**8,781,130,000**
	1. Dabuan	498,541,000
	2. Terrak	587,496,000
	3. Mangar	519,526,000
	4. Bandaran	537,757,000
	5. Kramat	500,035,000
	6. Ambat	535,639,000
	7. Branta Pesisir	482,366,000
	8. Tlanakan	524,619,000
	9. Branta Tinggi	475,292,000
	10. Tlesah	465,959,000
	11. Larangan Tokol	566,268,000
	12. Ceguk	488,765,000
	13. Panglegur	538,698,000
	14. Bukek	470,284,000
	15. Gugul	499,033,000
	16. Larangan Slampar	560,330,000
	17. Taro'an	530,522,000
2	**KECAMATAN PADEMAWU**	**9,866,840,000**
	1. Tanjung	546,797,000
	2. Padelegan	511,514,000
	3. Majungan	484,837,000
	4. Pagagan	478,083,000
	5. Jarin	526,863,000
	6. Baddurih	479,793,000
	7. Buddih	459,542,000
	8. Sopa'ah	459,302,000
	9. Prekbun	457,055,000
	10. Durbuk	486,921,000
	11. Pademawu Barat	521,070,000
	12. Pademawu Timur	539,232,000
	13. Bunder	481,258,000
	14. Dasok	499,332,000
	15. Murtajih	509,079,000
	16. Sumedangan	478,322,000
	17. Lemper	478,371,000
	18. Sentol	495,605,000
	19. Tambung	486,498,000
	20. Buddagan	487,366,000
3	**KECAMATAN GALIS**	**4,890,642,000**
	1. Tobungan	483,342,000
	2. Konang	539,215,000
	3. Pandan	494,231,000
	4. Lembung	475,399,000
	5. Galis	477,437,000
	6. Bulay	503,273,000
	7. Pagendingan	477,053,000
	8. Ponteh	468,954,000
	9. Polagan	517,468,000
	10. Artodung	454,270,000

NO	KECAMATAN / DESA	BESARAN (Rp)
1	2	3
4	**KECAMATAN PAMEKASAN**	**4,347,121,000**
	1. Panempan	465,335,000
	2. Laden	489,265,000
	3. Jalmak	481,052,000
	4. Teja Barat	511,403,000
	5. Teja Timur	488,844,000
	6. Bettet	493,035,000
	7. Nyalabu Laok	468,450,000
	8. Nyalabu Daya	477,302,000
	9. Toronan	472,435,000
5	**KECAMATAN PROPPO**	**14,201,856,000**
	1. Karang Anyar	478,929,000
	2. Toket	544,692,000
	3. Candi Burung	532,504,000
	4. Batokalangan	535,562,000
	5. Gro'om	538,470,000
	6. Srambah	518,958,000
	7. Pangtonggal	540,125,000
	8. Samiran	509,270,000
	9. Kodik	463,221,000
	10. Klampar	531,010,000
	11. Samatan	512,409,000
	12. Lenteng	469,410,000
	14. Tlangoh	480,375,000
	15. Billa'an	475,814,000
	15. Rangperang Laok	485,701,000
	16. Rangperang Daja	568,745,000
	17. Banyubulu	495,280,000
	18. Pangorayan	484,763,000
	19. Panglemah	470,986,000
	20. Mapper	499,862,000
	21. Proppo	497,912,000
	22. Jambringan	608,240,000
	23. Campor	710,678,000
	24. Panagguan	622,038,000
	25. Pangbatok	534,839,000
	26. Tattangoh	524,005,000
	27. Badung	568,058,000
6	**KECAMATAN PALENGAAN**	**7,321,250,000**
	1. Banyupelle	741,874,000
	2. Rek Kerrek	780,100,000
	3. Angsanah	569,322,000
	4. Akkor	533,348,000
	5. Larangan Badung	562,773,000
	6. Pana'an	535,854,000
	7. Poto'an Laok	483,627,000
	8. Poto'an Dajah	549,277,000
	9. Kacok	498,456,000
	10. Rombuh	510,099,000
	11. Palenga'an Laok	776,000,000
	12. Palenga'an Dajah	780,520,000
7	**KECAMATAN PEGANTENAN**	**7,657,610,000**
	1. Plak Pak	826,525,000
	2. Palesanggar	686,097,000
	3. Pegantenan	501,921,000
	4. Bulangan Branta	470,684,000
	5. Bulangan Barat	539,541,000
	6. Bulangan Haji	549,882,000
	7. Tlagah	494,773,000
	8. Bulangan Timur	506,424,000
	9. Tebul Timur	498,950,000
	10. Tebul Barat	479,250,000
	11. Ambender	590,598,000
	12. Pasanggar	774,192,000
	13. Tanjung	738,773,000

NO	KECAMATAN / DESA	BESARAN (Rp)
1	2	3
8	**KECAMATAN LARANGAN**	**6,954,704,000**
	1. Peltong	466,584,000
	2. Blumbungan	680,284,000
	3. Trasak	501,292,000
	4. Tentenan Barat	454,992,000
	5. Tentenan Timur	450,468,000
	6. Grujugan	469,368,000
	7. Larangan Luar	551,188,000
	8. Larangan Dalam	501,305,000
	9. Panagguan	475,445,000
	10. Montok	484,688,000
	11. Taraban	465,863,000
	12. Duko Timur	480,158,000
	13. Lancar	468,976,000
	14. Kaduara Barat	504,093,000
9	**KECAMATAN PAKONG**	**5,976,119,000**
	1. Bicorong	530,550,000
	2. Klompang Barat	488,268,000
	3. Klompang Timur	509,365,000
	4. Cen Lecen	499,138,000
	5. Bajang	475,513,000
	6. Ban Ban	461,726,000
	7. Somalang	463,949,000
	8. Palalang	474,404,000
	9. Seddur	520,305,000
	10. Pakong	551,718,000
	11. Bandungan	490,502,000
	12. Lebbek	510,681,000
10	**KECAMATAN WARU**	**7,042,612,000**
	1. Bajur	654,486,000
	2. Sumber Waru	668,171,000
	3. Tampojung Pregih	548,791,000
	4. Tampojung Guwa	476,150,000
	5. Tampojung Tengah	526,526,000
	6. Tampojung Tenggina	514,167,000
	7. Ragang	544,625,000
	8. Sana Laok	717,766,000
	9. Waru Timur	720,489,000
	10. Waru Barat	673,446,000
	11. Tlonto Ares	479,837,000
	12. Tagangser Laok	518,158,000
11	**KECAMATAN BATUMARMAR**	**8,175,166,000**
	1. Bujur Barat	713,846,000
	2. Pangerreman	584,395,000
	3. Bangserreh	591,422,000
	4. Lessong Laok	537,532,000
	5. Ponjanan Barat	627,672,000
	6. Ponjanan Timur	611,562,000
	7. Kapong	499,543,000
	8. Lessong Daja	567,097,000
	9. Batu Bintang	666,081,000
	10. Blaban	638,389,000
	11. Tamberu	473,735,000
	12. Bujur Tengah	793,370,000
	13. Bujur Timur	870,522,000

NO	KECAMATAN / DESA	BESARAN (Rp)
1	*2*	*3*
12	**KECAMATAN KADUR**	**5,454,416,000**
	1. Pamaroh	536,422,000
	2. Pamoroh	608,200,000
	3. Sokolelah	488,824,000
	4. Gagah	465,787,000
	5. Kertagenah Laok	479,964,000
	6. Kertagenah Tengah	560,339,000
	7. Bungbaruh	586,912,000
	8. Kadur	566,548,000
	9. Bangkes	646,760,000
	10. Kertagenah Dajah	514,660,000
13	**KECAMATAN PASEAN**	**5,233,363,000**
	1. Sana Tengah	625,002,000
	2. Sana Daja	602,355,000
	3. Tagangser Daja	499,745,000
	4. Sotabar	521,820,000
	5. Tlonto Raja	696,037,000
	6. Dempo Barat	545,925,000
	7. Dempo Timur	571,948,000
	8. Bindang	520,618,000
	9. Batokerbuy	649,913,000
	J U M L A H	**95,902,829,000**

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII